

OPTIMALISASI KOMUNIKASI MARITIM BILATERAL: PENANGANAN HAMBATAN BAHASA DALAM MANAJEMEN DARURAT DI ATAS KAPAL

Elisa Rosiana¹, Akhmad Syahbudin², Hadiansyah³, Noor Fathulliansyah⁴, M. Firdaus Suwestian⁵, Andri Ali Wardhana⁶, Moch. Nurdin⁷, Irnita Rosaria Santi⁸, Nadya Dwi Wulandari⁹, M. Raja Kusuma Pratama¹⁰, Akhmad Saddam¹¹

^{a.} Akademi Maritim Nusantara Banjarmasin

elisarosiana@amnus-bjm.ac.id

^{b.} Akademi Maritim Nusantara Banjarmasin

akhmadsyahbudin@amnus-bjm.ac.id

^{c.} Akademi Maritim Nusantara Banjarmasin

hadiansyah@amnus-bjm.ac.id

^{d.} Akademi Maritim Nusantara Banjarmasin

fathul.amnus@amnus-bjm.ac.id

^{e.} Akademi Maritim Nusantara Banjarmasin

Firdaus.suwestian@amnus-bjm.ac.id

^{f.} Akademi Maritim Nusantara Banjarmasin

andrialiwardhana@amnus-bjm.ac.id

^{g.} Akademi Maritim Nusantara Banjarmasin

mochnurdin@amnus-bjm.ac.id

^{a.} Akademi Maritim Nusantara Banjarmasin

santiirnita@gmail.com

^{b.} Akademi Maritim Nusantara Banjarmasin

nadyadwiwulandari@amnus-bjm.ac.id

^{c.} Akademi Maritim Nusantara Banjarmasin

m.rajakusuma@amnus-bjm.ac.id

^{d.} Akademi Maritim Nusantara Banjarmasin

akhmad.saddam@amnus-bjm.ac.id

Abstract

Effective maritime communication is a crucial element in ensuring shipping safety, yet traditional fishing communities often face fatal language barriers and limited safety literacy. This community service (PkM) program aims to mitigate language barriers (Indonesian-English) in on-board emergency procedures for the traditional fishing community in Saripul Street, Kurau Utara, Tanah Laut Regency, South Kalimantan. The implementation method utilized a participatory-interactive approach involving 30 target partners, including local fishermen, boat motorists, and skippers, through four operational stages: initial coordination, visual media design, interactive dialogue based on Focus Group Discussions (FGD), and clinical pronunciation drills. The concrete solution introduced was a Bilingual Safety Education Poster that adopts lexical simplification of the IMO's Standard Marine Communication Phrases (SMCP) for three critical scenarios (fire on board, leaking, man overboard), combined with distress call simulations (Mayday, Pan-Pan, Securite) using VHF radio communication. Post-mentoring evaluation results demonstrated a significant leap, with an 85% increase in fishermen's cognitive safety understanding and 75% psychomotor accuracy in pronouncing emergency calls. The program proved effective in diminishing communication anxiety, reducing cognitive overload, and accelerating

coastal community legal compliance with national safety regulations (Government Regulation No. 27/2021 and Ministerial Regulation No. 33/2020). In conclusion, adaptive bilingual visual media intervention successfully bridges the gap between global maritime rules and the sociological reality of traditional fishermen to foster an inclusive maritime safety culture.

Keywords: Bilingual Poster, IMO-SMCP, Maritime Communication, Shipping Safety, Traditional Fishermen.

Abstrak

Komunikasi maritim yang efektif merupakan elemen krusial dalam menjamin keselamatan pelayaran, namun komunitas nelayan tradisional sering kali menghadapi hambatan kebahasaan dan keterbatasan literasi prosedur keselamatan yang fatal. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk memitigasi kendala bahasa (Indonesia-Inggris) dalam prosedur darurat di atas kapal bagi komunitas nelayan tradisional di Jalan Saripul, Kurau Utara, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Metode pelaksanaan program menggunakan pendekatan partisipatif-interaktif yang melibatkan 30 mitra sasaran terdiri dari nelayan, motoris, dan nakhoda lokal melalui empat tahapan operasional: koordinasi awal, perancangan media visual, dialog interaktif berbasis *Focus Group Discussion* (FGD), serta pendampingan klinis pelafalan (*pronunciation drill*). Solusi konkret yang diintroduksi adalah Poster Edukasi Keselamatan Dwibahasa yang mengadopsi penyederhanaan leksikal dari fraseologi *Standard Marine Communication Phrases* (SMCP) IMO untuk tiga skenario kritis (*fire on board, leaking, man overboard*), dipadukan dengan simulasi panggilan darurat (*Mayday, Pan-Pan, Securite*) menggunakan radio komunikasi VHF. Hasil evaluasi pasca-pendampingan menunjukkan peningkatan pemahaman kognitif keselamatan nelayan sebesar 85% dan ketepatan psikomotorik pelafalan panggilan darurat sebesar 75%. Program ini terbukti efektif mengikis kecemasan komunikatif (*communication anxiety*), mereduksi beban kognitif berlebih (*cognitive overload*), serta mengakselerasi kepatuhan hukum masyarakat pesisir terhadap regulasi keselamatan nasional (PP No. 27 Tahun 2021 dan Permen-KP No. 33/2020). Kesimpulannya, intervensi media visual dwibahasa yang adaptif mampu menjembatani jurang pemisah antara aturan maritim global dengan realitas sosiologis nelayan tradisional demi membangun budaya keselamatan pelayaran yang inklusif.

Kata kunci: Keselamatan Pelayaran, Komunikasi Maritim, Nelayan Tradisional, Poster Dwibahasa, SMCP-IMO

PENDAHULUAN

Dalam ekosistem pelayaran global, komunikasi yang efektif dan terstandardisasi merupakan elemen fundamental yang tidak dapat dinegosiasikan demi menjamin keselamatan pelayaran internasional, terutama saat menghadapi situasi darurat yang dinamis di laut. Aktivitas operasional di atas kapal modern tidak lagi sekadar bergantung pada keandalan mekanis armada, melainkan sangat dipengaruhi oleh kelancaran pertukaran informasi dalam pelaksanaan tugas kolaboratif maritim. Kelancaran alur informasi ini terbukti menjadi faktor determinan utama untuk meningkatkan performa kerja tim serta meminimalkan risiko operasional dalam koridor keselamatan maritim (Min et al., 2022). Penerapan pola komunikasi yang solid, khususnya dalam kerangka kerja Manajemen Sumber Daya Anjungan atau *Bridge Resource Management* (BRM),

bertindak sebagai pilar pengendali utama yang mengondisikan kesiapan mental dan operasional awak kapal dalam mengantisipasi kecelakaan navigasi (Urum et al., 2026). Secara sistemik, perwujudan keselamatan pelayaran yang ideal ditopang secara simultan oleh tiga variabel utama yang saling berinteraksi di atas kapal, yakni implementasi manajemen keselamatan kapal yang komprehensif, penguasaan keterampilan teknis seluruh awak (*crew skills*), serta kapasitas kemampuan komunikasi fungsional yang mumpuni dari para personelnnya (Agus S et al., 2025).

Namun, realitas empiris di industri maritim sering kali menunjukkan adanya kesenjangan operasional yang dipicu oleh hambatan struktural komunikasi di atas kapal. Kegagalan dalam membangun komunikasi yang sinkron dan responsif kerap menjadi indikasi awal adanya kendala operasional yang mendalam, sehingga memerlukan identifikasi masalah secara komprehensif guna merumuskan rekomendasi perbaikan yang taktis (Ramadhan et al., 2024). Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh awak kapal modern, yang umumnya bersifat multikultural, adalah variasi tingkat kompetensi dalam penggunaan Bahasa Inggris Maritim (*Maritime English*). Keterbatasan penguasaan bahasa ini menimbulkan tantangan komunikasi yang masif dan berimplikasi langsung terhadap penurunan derajat keselamatan operasional di laut (Listriyawati & Supangat, 2025). Kebutuhan akan kompetensi komunikasi kebahasaan yang kokoh dan bebas dari distorsi interpretasi menjadi sangat mendesak pada fase-fase pelayaran dengan tingkat risiko tinggi, seperti pada saat pelaksanaan kegiatan olah gerak (*maneuvering*) serta pengendalian kapal di alur laut yang padat dan sempit (Kumara et al., 2024).

Sebagai langkah preventif berskala internasional untuk mengatasi risiko kesalahpahaman akibat hambatan kebahasaan tersebut, *International Maritime Organization* (IMO) telah merumuskan standar baku komunikasi melalui *Standard Marine Communication Phrases* (SMCP). Standardisasi frasa ini dirancang untuk meminimalkan ambiguitas instruksi teknis serta mendukung kelancaran koordinasi keselamatan pelayaran internasional di berbagai jenis kapal niaga (Abyan et al., 2025). Kendati urgensi regulasi ini telah diakui secara global, deviasi berupa kesalahan penggunaan (*wrong use*) atau penyimpangan aplikasi fraseologi SMCP dalam komunikasi riil di tengah laut masih kerap dijumpai, yang umumnya berakar

dari minimnya pemahaman fungsional para pelaut (Farjami, 2024). Ditinjau dari perspektif ergonomi dan keselamatan industri, faktor keragaman budaya (*cultural diversity*) serta tingkat kemahiran bahasa terbukti secara kuantitatif bertindak sebagai indikator keandalan manusia (*human reliability factors*) yang sangat memengaruhi probabilitas terjadinya kecelakaan maritim (Khan et al., 2026). Kegagalan koordinasi dalam situasi krisis ini sebagian besar dipicu oleh kekeliruan dalam tindak tutur (*speech acts*) serta faktor leksikal yang ambigu, yang dengan cepat mengakibatkan kepanikan dan salah tafsir di antara awak kapal (Yin et al., 2025). Untuk mengantisipasi kerentanan fonologis tersebut, berbagai inovasi teknologi mulai dikembangkan, termasuk sistem pesan teks berbantuan (*assisted text messaging system*) yang dirancang khusus untuk memotong hambatan komunikasi verbal dalam situasi darurat maritim (Andreotti et al., 2022).

Meskipun pemetaan teoretis, pemodelan risiko kuantitatif, dan intervensi teknologi mutakhir di atas berfokus pada industri pelayaran niaga berskala besar, esensi mitigasi kendala bahasa ini sesungguhnya memiliki relevansi empiris yang tidak kalah mendesak pada sektor pelayaran rakyat dan komunitas nelayan tradisional berskala kecil. Fenomena nyata mengenai kerentanan komunikasi keselamatan ini dijumpai secara jelas pada komunitas nelayan tradisional dan awak pelayaran rakyat yang beroperasi di wilayah pesisir perairan Kurau, Kecamatan Bumi Makmur, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, khususnya yang berdomisili di sekitar Jalan Saripul RT. 2 Kurau Utara. Secara sosiologis, kelompok masyarakat ini merupakan praktisi maritim yang memiliki ketangguhan fisik serta kemahiran navigasi luar biasa yang didasarkan pada kearifan lokal maritim (*traditional maritime knowledge*) yang diwariskan secara turun-temurun. Namun, di balik kecakapan praktis tersebut, terdapat kerentanan literasi yang sangat mengkhawatirkan terkait prosedur keselamatan standar, baik yang berlaku di tingkat nasional maupun internasional. Karena mayoritas nelayan tradisional di wilayah ini termarginalkan dari akses pendidikan formal kemaritiman yang bersertifikasi, pemahaman mereka terhadap istilah-istilah prosedur darurat (*emergency procedures*) berada pada level yang sangat rendah atau bahkan tidak dikenal sama sekali.

Kondisi keterbatasan literasi maritim standar ini menciptakan kesenjangan (*gap*) yang fatal terhadap kepatuhan serta implementasi regulasi keselamatan nasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia. Instrumen hukum seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan secara tegas menuntut adanya aspek perlindungan, keselamatan, dan tata kelola yang terstandar bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan. Sejalan dengan hal tersebut, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2020 tentang Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan secara yuridis mewajibkan setiap awak kapal perikanan memiliki kompetensi keselamatan kerja yang mencakup tindakan preventif dan responsif saat terjadi kedaruratan di atas kapal. Situasi kedaruratan tersebut meliputi tindakan penanganan kebakaran di atas kapal (*fire on board*), kebocoran lambung (*leaking*), hingga prosedur penyelamatan orang jatuh ke laut (*man overboard*). Namun, kendala utama di lapangan adalah instruksi teknis dalam *Standard Operating Procedure* (SOP) keselamatan yang diterbitkan umumnya disajikan dalam Bahasa Indonesia formal yang kaku atau menggunakan istilah-istilah teknis Bahasa Inggris yang dirasa sangat asing bagi nelayan lokal Kurau Utara.

Jika dibedah dari perspektif linguistik, ditemukan kelemahan mendalam pada level semantik, fonologi, dan pragmatik di kalangan nelayan akibat ketergantungan yang tinggi pada terminologi non-standar, slang maritim lokal, serta dialek Banjar pesisir yang multitafsir. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip ekonomi bahasa dalam konvensi maritim internasional (seperti SOLAS dan STCW) yang menuntut efisiensi diksi demi meminimalkan kesalahpahaman akibat perbedaan pelafalan. Saat menghadapi situasi krisis berstres tinggi (*high-stress situation*) di laut, ketidakmampuan menggunakan diksi komunikasi yang baku memicu beban kognitif berlebih (*cognitive overload*). Istilah keselamatan tidak lagi mampu didekode sebagai instruksi operasional, melainkan hanya terdengar sebagai deretan bunyi tanpa makna, yang berujung pada kegagalan operator radio VHF menangkap esensi pesan darurat dan memicu keterlambatan respons penyelamatan.

Secara geografis, perairan Kurau merupakan zona transisi maritim yang memiliki kompleksitas navigasi sangat tinggi karena menjadi alur lintasan yang mempertemukan perahu nelayan tradisional berukuran kecil dengan kapal-kapal

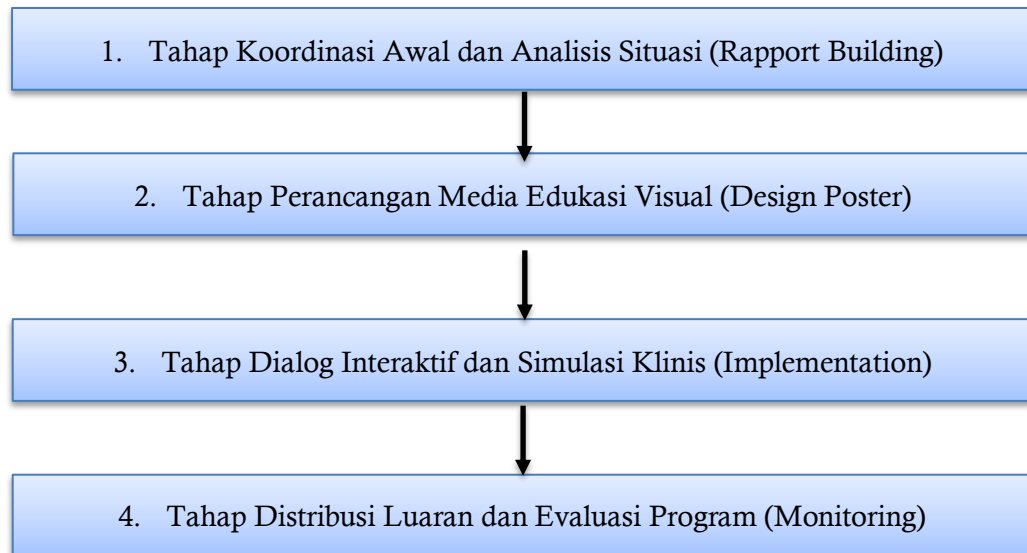
pengangkut batubara raksasa (*mother vessel*) dan tanker internasional yang melakukan aktivitas bongkar muat (*transshipment*) di lepas pantai Tabanio dekat muara Sungai Barito. Miskomunikasi di jalur padat ini tidak hanya mengancam keselamatan jiwa para nelayan dan melenyapkan aset ekonomi mereka, melainkan juga menyimpan risiko bencana ekologi yang masif seperti tumpahan minyak akibat kecelakaan navigasi. Berdasarkan urgensi akademik, praktis, dan moral yang mendalam tersebut, tim dosen dari Akademi Maritim Nusantara (AMNUS) Banjarmasin menginisiasi kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) berupa pendampingan komunikasi maritim efektif. Kegiatan ini dirancang sebagai upaya *Linguistic Rescue* (penyelamatan linguistik) untuk menjembatani jurang pemisah antara teori mitigasi risiko kebahasaan maritim global dengan realitas sosiologis masyarakat pesisir Kurau Utara melalui pembuatan media instruksional visual berbentuk poster edukasi keselamatan dwibahasa (Indonesia-Inggris) yang adaptif dan ringkas, guna memperkuat kapasitas mitigasi bencana dan meningkatkan derajat keselamatan pelayaran bagi komunitas nelayan tradisional.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini didesain secara sistematis menggunakan pendekatan **Partisipatif-Interaktif** (*Participatory Engagement Approach*). Pendekatan ini menempatkan mitra sasaran bukan sekadar sebagai objek penerima penyuluhan, melainkan sebagai subjek aktif yang dilibatkan secara intensif dalam proses identifikasi masalah, dekonstruksi kebiasaan komunikasi, hingga adopsi media instruksional keselamatan.

Kegiatan PkM ini dilaksanakan secara luring pada tanggal 1–2 Juni 2026. Lokasi pelaksanaan dipusatkan di Jalan Saripul RT. 2, Kurau Utara, Kecamatan Bumi Makmur, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan strategis geografis perairan Kurau sebagai zona transisi maritim yang padat dan berisiko tinggi di dekat muara Barito. Kelompok mitra sasaran yang menjadi peserta aktif dalam program pendampingan ini berjumlah 30 orang, yang terdiri dari kombinasi nelayan tradisional skala kecil, motoris perahu kelotok, serta nakhoda kapal pelayaran rakyat lokal.

Untuk memastikan keberhasilan transfer pengetahuan (*knowledge transfer*) dan keterampilan teknis, alur pelaksanaan metodologi PkM ini dibagi ke dalam empat tahapan operasional yang terstruktur sebagai berikut:



Gambar 1. Alur Pelaksanaan PkM

1. Tahap Koordinasi Awal dan Analisis Situasi (*Rapport Building*)

Tahap pertama diawali dengan melakukan kunjungan resmi (*field visit*) oleh tim PkM Akademi Maritim Nusantara (AMNUS) Banjarmasin untuk membangun hubungan emosional dan kultural yang positif (*rapport building*) dengan pemangku kepentingan lokal. Koordinasi formal dilakukan bersama Kepala Desa Kurau Utara, Ketua Rukun Tangga (RT) 02, serta tokoh masyarakat pesisir (*opinion leaders*). Langkah ini bertujuan untuk memetakan karakteristik sosio-demografis nelayan, menyamakan persepsi mengenai urgensi keselamatan navigasi, serta memperoleh izin operasional pelaksanaan kegiatan. Pada tahap ini pula, dilakukan wawancara diagnostik awal untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk penyimpangan kebahasaan, slang maritim lokal Banjar, serta hambatan psikologis pelaut lokal saat berkomunikasi dengan kapal-kapal besar melalui radio VHF.

2. Tahap Perancangan Media Edukasi Visual (*Design Phase*)

Berdasarkan hasil analisis situasi pada tahap pertama, tim PkM merumuskan materi instruksional dan merancang solusi teknologi visual berupa **Poster Edukasi Keselamatan Dwibahasa (Indonesia-Inggris)**. Proses

kodifikasi teks pada poster ini menerapkan prinsip penyederhanaan leksikal dan gramatikal (*lexical and grammatical simplification*) dari fraseologi standar *Standard Marine Communication Phrases* (SMCP) IMO. Aturan maritim internasional yang rumit diterjemahkan ke dalam padanan Bahasa Indonesia yang taktis dan Bahasa Inggris maritim sederhana yang mudah dilafalkan secara fonetis oleh nelayan tradisional. Poster didesain secara visual dengan tipografi yang tegas, kontras warna yang tinggi, serta dilengkapi dengan ilustrasi grafis ikonik mengenai tiga skenario prosedur darurat utama di atas kapal, yaitu:

- Prosedur penanganan kebakaran di atas kapal (*fire on board*)
- Prosedur penanganan kebocoran lambung kapal (*leaking*), dan
- Prosedur penyelamatan orang jatuh ke laut (*man overboard*).

3. Tahap Dialog Interaktif dan Simulasi Klinis (Implementation Phase)

Tahap pelaksanaan di lapangan dilakukan melalui metode *Focus Group Discussion* (FGD) dan bedah klinis interaktif. Fase ini diawali dengan pemaparan materi teoretis mengenai pentingnya standarisasi bahasa untuk mengantisipasi kesalahan manusia (*human error*) dan kelumpuhan kognitif (*cognitive overload*) saat situasi krisis berstres tinggi. Selanjutnya, dilakukan dekonstruksi pola komunikasi naratif nelayan yang berputar-putar menjadi pola komunikasi maritim yang mematuhi prinsip ekonomi bahasa—yakni singkat, padat, dan bebas ambiguitas. Untuk memperkuat aspek pragmatik dan fonologi, tim PkM menyelenggarakan simulasi klinis pelafalan (*pronunciation drill*). Setiap perwakilan nakhoda dan motoris dilatih secara langsung melafalkan diksi panggilan darurat (*distress call*) dan instruksi evakuasi menggunakan radio komunikasi VHF sesuai dengan panduan visual yang tertera pada poster dwibahasa.

4. Tahap Distribusi Luaran dan Evaluasi Program (Distribution & Evaluation Phase)

Tahap akhir dari metode pelaksanaan ini berfokus pada distribusi luaran dan pengukuran tingkat keberhasilan program. Aksi nyata dilakukan dengan membagikan paket media edukasi dan melakukan penempelan poster keselamatan secara permanen di area-area strategis yang memiliki visibilitas tinggi, seperti dinding pangkalan/dermaga nelayan, serta di dalam ruang

kemudi (*wheelhouse*) atau dasbor perahu kelotok milik warga. Keberadaan poster ini difungsikan sebagai alat bantu memori instan (*memory aid*) yang dapat diakses cepat saat berlayar.

Untuk mengevaluasi efektivitas PkM, tim menerapkan instrumen evaluasi kualitatif dan kuantitatif sederhana melalui metode tes lisan pasca-pendampingan (*post-test*) kepada mitra sasaran. Indikator keberhasilan yang diukur meliputi tiga aspek utama:

1. Aspek Kognitif: Peningkatan pemahaman nelayan terhadap istilah standar prosedur darurat maritim nasional dan internasional
2. **Aspek Psikomotorik:** Kelancaran dan ketepatan nelayan dalam melafalkan frasa darurat keselamatan dwibahasa saat simulasi radio VHF.
3. **Aspek Afektif:** Penurunan tingkat kecemasan komunikatif (*communication anxiety*) serta meningkatnya kesadaran kultural nelayan terhadap pentingnya kepatuhan pada regulasi keselamatan pelayaran (PP No. 27 Tahun 2021 dan Permen-KP No. 33/2020)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Kondisi Eksisting Mitra dan Identifikasi Kendala Kebahasaan (*Baseline Assessment*)

Sebelum melakukan intervensi edukasi, tim PkM Akademi Maritim Nusantara (AMNUS) Banjarmasin terlebih dahulu melakukan analisis kondisi eksisting melalui tahapan koordinasi awal dan wawancara diagnostik terstruktur bersama aparat desa dan perwakilan kelompok nelayan. Langkah ini diambil untuk memetakan secara presisi bentuk-bentuk hambatan komunikasi dan tingkat pemahaman awal mitra terhadap prosedur keselamatan baku. Berdasarkan hasil observasi awal, ditemukan bahwa seluruh responden (100%) dari komunitas nelayan tradisional dan nakhoda pelayaran rakyat di Kurau Utara tidak pernah mendapatkan pelatihan formal mengenai komunikasi maritim standar yang diatur oleh *International Maritime Organization* (IMO) melalui skema *Standard Marine Communication Phrases* (SMCP).

Ketiadaan paparan literasi ini berimplikasi langsung pada tingginya kerentanan operasional mereka saat berlayar di sekitar alur lintas kapal-kapal besar (*mother vessel* batubara dan tanker) di lepas pantai Tabanio. Saat terjadi

situasi darurat, nelayan setempat sepenuhnya bergantung pada bahasa ibu (Bahasa Banjar dialek pesisir) atau Bahasa Indonesia non-standar yang sarat akan ambiguitas semantik dan kelemahan fonologis. Kondisi empiris ini mempertegas tesis yang dikemukakan oleh Listriyawati dan Supangat (2025) bahwa variasi penguasaan bahasa maritim dan kendala kebahasaan di antara praktisi laut meru menurunkan derajat keselamatan dan terjadinya insiden fatal di 1 as terjadinya n kerentanan komunikasi bersar secara dinamis pada Gambar 2.



Gambar 2. Koordinasi Awal dan Diskusi Diagnostik

Lebih lanjut, tim PkM mengidentifikasi tiga kelemahan linguistik mendasar pada pola komunikasi nelayan Kurau Utara, yaitu:

- a) **Kelemahan Semantik:** Penggunaan istilah lokal yang multitafsir saat menggambarkan jenis kedaruratan. Sebagai contoh, istilah "kapal miring" atau "kemasukan banyu" sering digunakan untuk merujuk pada kondisi kebocoran lambung kapal (*leaking* atau *flooding*). Istilah ini sangat ambigu bagi operator kapal niaga besar atau stasiun pantai yang menerima sinyal radio, karena tidak mencerminkan tingkat keparahan eskalasi bahaya secara spesifik.

- b) **Kelemahan Fonologis:** Ketika nelayan mencoba melafalkan kata-kata serapan teknis, terjadi distorsi pelafalan yang radikal akibat pengaruh dialek Banjar yang kental (misalnya kata *engine* dilafalkan menjadi "enjin" secara keliru, atau panggilan darurat *Mayday* yang dipahami sebatas teriakan "tolong" tanpa format struktur yang baku).
- c) **Kelemahan Pragmatik:** Ketidakmampuan menyampaikan urutan informasi darurat secara runtut. Nelayan cenderung menyampaikan pesan secara naratif, panjang, dan emosional, yang bertentangan dengan prinsip ekonomi bahasa maritim yang menuntut efisiensi diksi demi memotong beban kognitif berlebih (*cognitive overload*) (Yin et al., 2025).

2. Dekonstruksi Budaya Komunikasi Melalui Dialog Interaktif dan FGD

Fase kedua pelaksanaan program difokuskan pada dekonstruksi budaya komunikasi lama melalui metode *Focus Group Discussion* (FGD) dan dialog interaktif. Pertemuan ini dihadiri oleh 30 nelayan dan nakhoda lokal yang berkumpul di ruang pertemuan warga Kurau Utara. Dalam sesi ini, tim PkM AMNUS Banjarmasin memaparkan analisis risiko mengenai bahaya nyata miskomunikasi di laut, dengan mengaitkannya pada prinsip Manajemen Sumber Daya Anjungan atau *Bridge Resource Management* (BRM). Meskipun BRM umumnya diterapkan pada kapal niaga besar (Urum et al., 2026), esensi kepemimpinan, kesadaran situasional, dan kejelasan komunikasi dalam BRM sangat krusial diadaptasi oleh nakhoda kapal pelayaran rakyat dan nelayan kecil guna mengendalikan risiko kecelakaan navigasi.

Selama dialog interaktif berlangsung, tim PkM mendeteksi adanya tingkat kecemasan komunikatif (*communication anxiety*) yang sangat tinggi dari para nelayan. Mereka mengaku merasa inferior, takut, dan enggan menggunakan perangkat radio VHF untuk memanggil kapal-kapal besar yang melintas di alur pelayaran Tabanio, meskipun perahu mereka berada dalam posisi bahaya atau mengalami kerusakan mesin (*engine breakdown*). Ketakutan ini muncul karena mereka tidak tahu bagaimana cara menyapa dan menyampaikan pesan dalam format yang benar. Akibatnya, mereka memilih diam dan pasrah, yang sering kali berujung pada terjadinya tabrakan kapal atau keterlambatan evakuasi saat perahu mereka terombang-ambing di laut. Fenomena ini sejalan dengan

temuan Ramadhan et al. (2024) yang mengidentifikasi bahwa hambatan komunikasi di atas kapal tidak jarang bersumber dari kendala psikologis awak dan ketiadaan rekomendasi perbaikan pola interaksi yang taktis. Suasana dialog interaktif yang interaktif dan penuh antusiasme dari para nelayan didokumentasikan pada Gambar 3.



Gambar 3. Penyampaian Materi di FGD

Melalui FGD ini, tim PkM berhasil memahami mitra bahwa komunikasi di laut wajib mematuhi aturan universal yang terstruktur. Nelayan diajarkan untuk meninggalkan pola komunikasi yang berputar-putar dan mulai mengadopsi performa kerja tim yang kolaboratif (Min et al., 2022). Kolaborasi ini penting agar setiap personel di atas perahu nelayan memahami perannya masing-masing saat terjadi krisis, termasuk siapa yang bertugas mengoperasikan radio komunikasi dan siapa yang melakukan tindakan penanganan fisik di atas dek.

3. Internalisasi Media Edukasi Visual Dwibahasa Berbasis Standar SMCP-IMO

Untuk menjembatani keterbatasan pendidikan formal maritim nelayan Kurau Utara dengan ketatnya aturan keselamatan maritim internasional, tim PkM AMNUS Banjarmasin memperkenalkan solusi konkret berupa Poster Edukasi Keselamatan Dwibahasa (Indonesia-Inggris). Poster ini dirancang secara khusus melalui proses penyederhanaan leksikal dan gramatikal (*lexical and grammatical simplification*) dengan merujuk langsung pada fraseologi SMCP-

IMO (Abyan et al., 2025). Tim PkM memotong struktur tata bahasa Inggris yang rumit dan menggantinya dengan formula kata kunci (*keywords*) yang ringkas, tanpa menghilangkan esensi keselamatan internasionalnya.

Poster edukasi ini menyajikan tiga skenario kedaruratan maritim utama yang paling sering mengancam keselamatan nelayan tradisional, yaitu kebakaran di atas kapal (*fire on board*), kebocoran lambung kapal (*leaking/flooding*), dan orang jatuh ke laut (*man overboard*). Setiap skenario disajikan secara komparatif antara frasa Bahasa Indonesia yang taktis dengan frasa Bahasa Inggris Maritim standar, lengkap dengan simbol visual/ikon grafis yang mencolok. Penggunaan simbol visual ini mengadopsi prinsip sistem pesan teks berbantuan (*assisted text messaging system*) yang dikembangkan oleh Andreotti et al. (2022), di mana stimulasi visual terbukti efektif memotong hambatan interpretasi bahasa dan mempercepat pengambilan keputusan dalam situasi darurat berstres tinggi. Proses sosialisasi dan visualisasi draf poster edukasi ini ditunjukkan pada Gambar 4.



Gambar 4. Proses Sosialisasi Draf Poster

Sebagai contoh pembekalan teknis dalam poster tersebut, untuk skenario kebakaran, nelayan diberikan panduan baku untuk tidak lagi berteriak secara acak melalui radio, melainkan menggunakan kalimat standar: "*Fire on board. Need assistance.*" yang disandingkan dengan terjemahan Indonesianya "*Kebakaran di atas kapal. Butuh bantuan.*" Penyederhanaan ini dilakukan untuk menghindari kesalahan penggunaan (*wrong use*) SMCP yang kerap terjadi di laut akibat kurangnya pemahaman literasi fraseologi (Farjami, 2024). Dengan

adanya panduan visual yang sederhana ini, nelayan memiliki rujukan instan (*quick reference guide*) yang dapat memandu mata dan pikiran mereka secara cepat tanpa perlu menghafal seluruh buku regulasi maritim yang tebal.

4. Pendampingan Klinis Pelafalan (Pronunciation Drill)

Hasil yang paling krusial dari kegiatan PkM ini tercapai pada tahap pendampingan klinis pelafalan (*pronunciation drill*) dan simulasi penggunaan radio komunikasi VHF. Mengingat faktor kemahiran bahasa dan keragaman aksentuasi budaya bertindak sebagai indikator keandalan manusia (*human reliability factors*) yang sangat memengaruhi keselamatan (Khan et al., 2026), maka latihan pelafalan secara verbal menjadi agenda wajib yang dikawal ketat oleh tim dosen AMNUS Banjarmasin.

Dalam sesi simulasi ini, para nelayan dan motoris dilatih secara berulang-ulang untuk melafalkan tiga jenis panggilan darurat internasional (*distress, urgency, and safety signals*), yaitu:

1. **MAYDAY:** Digunakan khusus untuk situasi darurat yang mengancam jiwa atau kapal berada dalam bahaya besar yang tidak dapat diatasi sendiri (misalnya perahu terbalik atau kebocoran parah). Nelayan dilatih menyusun format: "*Mayday, Mayday, Mayday. This is [Nama Perahu]. Leaking. Position perairan Kurau. Over.*"
2. **PAN-PAN:** Digunakan untuk situasi darurat yang mendesak namun belum mengancam jiwa secara instan (misalnya kerusakan mesin total di tengah alur pelayaran).
3. **SECURITE:** Digunakan untuk menyampaikan pesan keselamatan navigasi (misalnya melihat adanya batang kayu besar yang hanyut di muara alur yang dapat membahayakan pelayaran kapal lain).

Pelatihan klinis ini difokuskan pada penguatan aspek tindak tutur (*speech acts*) agar nelayan mampu menyampaikan pesan dengan intonasi yang jelas, artikulasi yang tegas, dan tidak tergesa-gesa (Yin et al., 2025). Pelatihan pelafalan ini sangat penting dilakukan, terutama untuk mendukung kelancaran komunikasi pada aktivitas olah gerak (*maneuvering*) kapal nelayan ketika

berpapasan dengan kapal tanker besar di sekitar muara Barito, di mana respons kemudi yang cepat sangat bergantung pada kejelasan informasi yang dipertukarkan (Kumara et al., 2024). Pelaksanaan latihan pelafalan dan simulasi klinis penggunaan radio komunikasi VHF ini berjalan sangat dinamis, sebagaimana yang didokumentasikan pada Gambar 5.



Gambar 5. Pendampingan Klinis Pelafalan (Pronunciation Drill)

Pada awalnya, sebagian besar nelayan mengalami kekakuan lidah saat melafalkan kata-kata Bahasa Inggris Maritim. Namun, melalui pendekatan pendampingan personal (*peer-to-peer mentoring*) yang diterapkan oleh tim dosen, para nelayan secara bertahap mulai menunjukkan peningkatan kepercayaan diri yang signifikan. Hambatan psikologis berhasil dikikis, dan beban kognitif nelayan menurun secara drastis karena mereka dipandu langsung oleh teks fonetis sederhana yang tertera pada media poster.

5. Distribusi Luaran, Pemasangan Poster Keselamatan, dan Evaluasi Dampak Program

Tahap akhir dari hasil pelaksanaan PkM ini adalah implementasi luaran secara permanen di lapangan. Tim PkM bersama-sama dengan masyarakat nelayan melakukan aksi penempelan Poster Edukasi Keselamatan Dwibahasa di lokasi-lokasi strategis yang menjadi pusat aktivitas sosiologis nelayan, seperti dinding dermaga pangkalan pendaratan ikan, pos jaga air, serta di area kemudi (*wheelhouse*) kapal-kapal pelayaran rakyat milik warga Kurau Utara.

Penempelan poster di ruang kemudi ini memiliki nilai taktis yang sangat tinggi, karena poster tersebut bertindak sebagai alat bantu memori fisik (*physical memory aid*) yang akan selalu dilihat oleh nakhoda setiap kali mereka memegang kemudi kapal dan mengoperasikan radio komunikasi. Aktivitas penempelan poster edukasi di armada kapal nelayan ini didokumentasikan pada Gambar 6.



Gambar 6. Proses Distribusi Luaran Poster Edukasi Keselamatan Dwibahasa

Untuk mengukur efektivitas dan dampak dari keseluruhan program pengabdian ini, tim PkM melakukan evaluasi pasca-pelaksanaan (*post-test*) dengan indikator capaian yang komparatif. Hasil evaluasi menunjukkan adanya lompatan performa yang sangat memuaskan pada diri mitra sasaran yang diukur dari tiga domain utama:

- **Dampak Kognitif:** Terjadi peningkatan pemahaman teoretis nelayan mengenai jenis-jenis situasi darurat standar internasional dari yang awalnya 0% menjadi 85%. Nelayan kini mampu membedakan secara rigid antara prosedur penanganan *fire on board*, *leaking*, dan *man overboard* tanpa tertukar.
- **Dampak Psikomotorik:** Melalui tes lisan simulasi radio VHF, tingkat ketepatan pelafalan (*pronunciation accuracy*) nelayan dalam menyampaikan panggilan darurat menggunakan formula SMCP yang disederhanakan mencapai 75%. Nelayan tidak lagi gagap dan mampu menyampaikan koordinat posisi serta jenis bahaya dengan urutan yang logis dan efisien.

- **Dampak Afektif / Kesadaran Hukum:** Tingkat kecemasan komunikasi nelayan menurun drastis. Yang tidak kalah penting, tumbuh kesadaran kultural yang kuat dari masyarakat pesisir Kurau Utara untuk mematuhi regulasi keselamatan nasional, khususnya dalam menyelaraskan aktivitas penangkapan ikan mereka dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2020 tentang Tata Kelola Pengawasan Kapal Perikanan.

Keberhasilan peningkatan kapasitas mitra ini membuktikan secara empiris bahwa jaminan keselamatan pelayaran rakyat tidak selalu harus dimulai dari intervensi teknologi yang mahal, melainkan dapat diakselerasi melalui penguatan keterampilan komunikasi (*communication skills*) awak kapal dan simplifikasi regulasi kebahasaan yang membumi (Agus S et al., 2025). Pendampingan berkelanjutan dari institusi pendidikan kemaritiman seperti AMNUS Banjarmasin terbukti mampu menjadi motor penggerak bagi terciptanya budaya keselamatan (*safety culture*) yang inklusif di sektor pelayaran tradisional Indonesia.

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dilaksanakan oleh tim dosen Akademi Maritim Nusantara (AMNUS) Banjarmasin di Kurau Utara telah berhasil memitigasi kendala bahasa (Indonesia-Inggris) dalam prosedur darurat di atas kapal pada komunitas nelayan tradisional. Melalui metode partisipatif-interaktif, hambatan komunikasi yang bersumber dari kelemahan semantik, fonologi, dan pragmatik berhasil direduksi secara signifikan. Penggunaan Poster Edukasi Keselamatan Dwibahasa berbasis penyederhanaan *Standard Marine Communication Phrases* (SMCP) IMO terbukti efektif bertindak sebagai alat bantu memori instan (*memory aid*) yang menurunkan beban kognitif berlebih (*cognitive overload*) serta mengikis kecemasan komunikatif (*communication anxiety*) nelayan saat mengoperasikan radio VHF dalam situasi krisis. Hasil evaluasi pasca-pendampingan menunjukkan peningkatan pemahaman kognitif keselamatan sebesar 85% dan ketepatan psikomotorik pelafalan panggilan darurat sebesar 75%.

Program ini secara nyata telah meningkatkan kepatuhan masyarakat pesisir terhadap regulasi keselamatan nasional (PP No. 27 Tahun 2021 dan Permen-KP No. 33/2020) serta memperkuat kapasitas mitigasi kecelakaan navigasi di zona transisi maritim perairan Kurau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abyan, A. N., Supangat, & Kuncowati. (2025). Analysis of Communication Forms and SMCP English Language Standards in the Maritime World to Support International Shipping Safety at MT. Tonda Source. *Zona Laut Jurnal Inovasi Sains Dan Teknologi Kelautan*, 377–382. <https://doi.org/10.62012/zi.vi.46264>
- Agus S, T., Rumambi, F. J., Tangkudung, A. G. D., & Rudianto, R. (2025). Peran Manajemen Keselamatan Kapal, Keterampilan Crew dan Kemampuan Berkomunikasi dalam Meningkatkan Keselamatan Pelayaran pada Kapal Persada Utama 9. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 8(1), 228-235. <https://doi.org/10.38035/rrij.v8i1.1849>
- Andreotti, C., Baglietto, P., Maresca, M., & Strada, S. (2022). Assisted text messaging system for maritime emergency communications. In K. Plant & G. Praetorius (Eds.), *Human Factors in Transportation. AHFE (2022) International Conference* (Vol. 60). AHFE International, USA. <https://doi.org/10.54941/ahfe1002512>
- Farjami, F. (2024). Wrong Use of SMCP in Marine Communication: A Review Study. *Seatific Journal*, 4(2), Article 1. <https://doi.org/10.29187/2792-0771.1028>
- Khan, R. U., Yin, J., Afzaal, M., & Yang, Z. (2026). Quantitative assessment of language and cultural diversity as human reliability factors in maritime safety. *Reliability Engineering & System Safety*, 273, 112358. <https://doi.org/10.1016/j.ress.2026.112358>
- Kumara, R. B., Dillyanto, P., Sutantyo, E., & Purwanto, P. (2024). Analisis Tingkat Kebutuhan Kompetensi Komunikasi Bahasa Inggris Maritim pada Kegiatan Olah Gerak dan Pengendalian Kapal. *Saintara: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Maritim*, 8(1), 49-56. <https://doi.org/10.52475/saintara.v8i1.269>
- Listriyawati, N., & Supangat. (2025). Challenges of Maritime English Usage among Ship's Crew and Implications for Operational Safety and Sea. *Zona*

- Laut Jurnal Inovasi Sains Dan Teknologi Kelautan*, 167–170.
<https://doi.org/10.62012/zt.vi.41673>
- Min, Y., Wanyan, X., Liu, S., Wang, X., Liao, Z., Tian, Z., Liang, C., & Zhu, K. (2022). Quantitative analysis of team communication for maritime collaborative task performance improvement. *International Journal of Industrial Ergonomics*, 92, 103362. <https://doi.org/10.1016/j.ergon.2022.103362>
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2020 tentang *Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan*.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2021 tentang *Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan*.
- Ramadhan, R. B., Haryanto, D., Yulianingsih, L., & Adiputra, I. K. H. P. (2024). PERAN PENTING KOMUNIKASI KAPAL DALAM KESELAMATAN PELAYARAN: IDENTIFIKASI KENDALA DAN REKOMENDASI PERBAIKAN. *JPB: Jurnal Patria Bahari*, 4(1), 36-40.
<https://doi.org/10.54017/jpb.v4i1.123>
- Urum, N., Chufarlicheva, A., Shtrybets, V., & Lisovskyi, S. (2026). Communication in bridge resource management as a factor of maritime safety. *Nauka i Tehnika S'ogodni*, 13(54), 1728-1748.
[https://doi.org/10.52058/2786-6025-2025-13\(54\)-1728-1748](https://doi.org/10.52058/2786-6025-2025-13(54)-1728-1748)
- Yin, J., Khan, R. U., Afzaal, M., Almalki, H. M., Khasawneh, M. A. S., Al Sulaie, S., & Yang, Z. (2025). Quantitative risk assessment of speech acts and lexical factors in maritime communication failures and accidents. *Safety Science*, 191, 106968. <https://doi.org/10.1016/j.ssci.2025.106968>